

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara dengan beragam kepercayaan. Di Indonesia sendiri terdapat 5 (lima) agama yang diakui meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha dan kepercayaan Konghucu. Bahwa dalam masing-masing agama telah diatur ketentuan mengenai perkawinan. Menurut agama Islam pengertian perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada agama Kristen memandang bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami yang diarahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan yang disucikan Kristus.¹

Pada agama Islam dan agama Kristen terdapat larangan dalam melakukan pernikahan dengan beda agama. Agama Islam diatur dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Telah jelas bahwa dalam Pasal 40 huruf c menyebutkan adanya larangan melakukan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang beragama non muslim. Larangan nikah beda

¹ R. Soetjho Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 33.

agama ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga serta akidah dan kemaslahatan umat islam.²

Pada agama Kristen yang mana Gereja Protestan umumnya menghindari perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari gereja akan mengijinkannya dengan catatan harus memenuhi persyaratan tertentu.³

Keyakinan Kristen Protestan pernikahan itu mempunyai dua aspek yaitu pertama, pernikahan merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara. Kedua, perkawinan adalah soal agama yang harus tunduk pada hukum agama. Dengan demikian, Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.⁴

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Hal ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa secara tersirat tidak diperbolehkan karena undang-undang tersebut menempatkan keabsahan suatu perkawinan kepada agama masing-masing (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

² Abdurrohman Kasdi, 2001, *Masail Fiqiyyah Kajian Fiqih Atas Masalah-Masalah Kontemporer*, Kudus: Nora Media Enterprise, hal. 125.

³ Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 105.

⁴ Lemta Tarigan dalam Maris Yolanda Soemarno, 2003, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No 1/1974*, USU, hal. 66.

agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pasal tersebut diketahui bahwa perkawinan itu sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kesimpulan ini diambil karena agama yang terdapat di Indonesia tidak ada yang membenarkan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. Ditegaskan dalam Pasal 8 huruf f bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Telah secara jelas disebutkan dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan bahwa terdapat larangan melakukan perkawinan yang mana oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam kasus ini telah terjadi perkawinan antar beda agama yaitu mempelai pria beragama Islam dan mempelai wanita beragama Kristen. Dimana dalam agama Kristen terdapat larangan untuk melakukan perkawinan dengan agama lain yang mana sebuah perkawinan harus berdasarkan dengan hukum agama dan hukum negara yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam membedakan perkawinan beda agama menjadi dua macam yakni beda agama sebelum dilaksanakannya perkawinan dan beda agama setelah terjadi perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berlanjut saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah sampai membina dan

menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Berikut penjelasannya :

1. Beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan

Antara rukun dan syarat dalam perkawinan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda apabila dalam suatu perkawinan ternyata ada yang tidak terpenuhi. Ketika rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan harus dinyatakan batal demi hukum, artinya pernikahan itu sejak dilangsungkan sudah tidak sah dan pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka pembatalannya tergantung dari pengajuan para pihak dan apabila tidak ada pengajuan maka pernikahannya dianggap sah.

2. Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan

Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencegahan perkawinan begitu penting dengan menempatkannya sebagai salah satu kewajiban pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena jika sebuah perkawinan yang cacat terjadi, maka dampaknya tidak sekedar memisahkan dua manusia yang terlanjur membangun cintanya dalam sebuah rumah tangga tetapi bisa melahirkan problem sosial bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

3. Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan

Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai dampak sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan

perkawinannya terhitung sejak putusan dijatuhkan. Jadi murtadnya seseorang tidak otomatis membuat pernikahannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵

Telah diketahui bahwa melakukan perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan di Indonesia, dan hukum yang mengatur tentang perkawinan campuran telah dihapuskan. Akan tetapi pada kenyataannya, terdapat beberapa masyarakat di Indonesia masih melaksanakan perkawinan yang berbeda agama. Untuk itu, perlu diketahui tentang bagaimana mereka yang melakukan perkawinan beda agama tersebut mendapatkan ijin dari pihak-pihak yang terkait yang mempunyai kewenangan sehingga dapat memberikan ijin untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PROSES PERMOHONAN IJIN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA.

B. Perumusan Masalah

Diketahui bahwa perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama islam. Dan pada Agama Kristen menganut asas monogami pada perkawinannya dengan sesama

⁵ *Ibid.*, hal. 222-225.

penganut kepercayaannya karena pada umumnya gereja Protestan tidak menghendaki perkawinan beda agama, sehingga apabila melakukan perkawinan beda agama, harus mengajukan permohonan izin ke pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan dapat diterimanya permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya penetapan hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul.⁶ Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan dapat diterimanya permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya penetapan hakim tentang perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

⁶ J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191.

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam proses permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan tambahan informasi dalam bidang hukum perdata tentang proses permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama sehingga bisa berguna untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam masyarakat.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai proses permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. Metode normatif yaitu kaidah hukum, asas hukum yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat diketahui kedudukan hukum dan legalitas tentang permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari skripsi ini adalah deskriptif, dimana penulis ingin mengetahui dengan cara menguraikan secara sistematis dan menyeluruh atas proses permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

3. Jenis Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Dalam mencari data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan proses permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

b. Data Primer

1) Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Surakarta. Dipilihnya lokasi tersebut karena mudah dijangkau oleh penulis selama mengerjakan penelitian.

2) Subyek Penelitiannya

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder dengan mempelajari ketiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan proses permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan bahan hukum tersier yang berguna untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Studi Lapangan

1) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara yang mana pertanyaan dibuat sesuai dengan judul penelitian yaitu yang berkaitan dengan perkawinan beda agama

dan pemberian izin terhadap perkawinan beda agama. Dimana daftar pertanyaan tersebut berguna untuk mengetahui hal pokok dari permasalahan yang akan ditanyakan.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh penanya terhadap narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan memperoleh data secara langsung dari narasumber dan membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik data kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur dan pendapat responden lapangan serta wawancara yang kemudian dianalisis untuk dilakukan pemecahan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diperoleh penulis telah sesuai dengan metode yang digunakan untuk menganalisis data.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam melakukan penulisan hukum ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan umum: pengertian perkawinan, syarat- syarat perkawinan, pengertian perkawinan beda agama, akibat hukum terhadap perkawinan beda agama, dasar hukum perkawinan beda agama, permohonan ijin melakukan perkawinan beda agama, proses pemeriksaan dan penetapan perkawinan beda agama, serta akibat hukum setelah adanya penetapan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menentukan dapat diterimanya permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dan menguraikan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya penetapan hakim tentang perkawinan beda agama.

BAB IV PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian hukum mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terkait hasil penelitian dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN